

ABSTRAK

Masyarakat terus menghadapi modifikasi, dan perbedaannya terletak atas tingkat dan sifat perubahan tersebut. Salah satu penyebab utama perubahan dalam masyarakat adalah proses modernisasi yang berlangsung. Selain faktor modernisasi, manusia terdorong untuk menjadi pengemis karena berbagai faktor psikologis dan budaya yang kompleks. Dengan latar belakang yang telah disajikan sebelumnya, terdapat rumusan masalah yang yaitu, bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember terhadap pengemis dalam memberikan jaminan sosial. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, yang berarti masalah yang dianalisis didasarkan pada penerapan aturan atau norma hukum positif. Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan hukum formal, seperti undang-undang, serta literatur yang memuat konsep-konsep teoritis. Pemerintah Kabupaten Jember memberikan perlindungan hukum kepada pengemis dan gelandangan melalui Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Jember. Namun, penting untuk memberikan jaminan sosial secara selektif kepada mereka. Program jaminan sosial di rumah perlindungan sosial bertujuan preventif, mencakup aspek kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, serta keterampilan. Upaya ini telah membawa hasil dengan pengurangan angka gelandangan serta pengemis, membuktikan keberhasilan Dinas Sosial dalam mengatasi masalah ini. Pemberian jaminan sosial, termasuk kesehatan, oleh Dinas Sosial adalah bagian dari perlindungan jiwa masyarakat, termasuk gelandangan maupun pengemis, yang memiliki hak yang setara dengan masyarakat lainnya.

Kata Kunci: Pengemis, Jaminan Sosial, Perlindungan, Dinas Sosial, Gelandangan.

ABSTRACT

Society continues to face modifications, and the difference lies in the extent and nature of those changes. One of the main causes of change in society is the ongoing modernization process. In addition to the modernization factor, humans are driven to become beggars due to various complex psychological and cultural factors. With the background that has been presented earlier, there is a formulation of the problem, namely, how the legal protection provided by the Jember Regency Government to beggars in providing social security. This research is normative juridical, which means that the problem analyzed is based on the application of positive legal rules or norms. Normative juridical research is carried out by examining various formal legal regulations, such as laws, as well as literature that contains theoretical concepts. The Jember Regency Government provides legal protection to beggars and homeless people through Regent Regulation Number 40 of 2014 concerning the Handling of Homeless and Beggars in Jember Regency. However, it is important to provide social security selectively to them. The social security program in the social protection house aims to be preventive, covering aspects of health, education, housing, and skills. This effort has yielded results with a reduction in the number of homeless and beggars, proving the success of the Social Service in overcoming this problem. The provision of social security, including health, by the Social Service is part of the protection of people's lives, including homeless people and beggars, who have equal rights with other communities.

Keywords: Beggars, Social Security, Protection, Social Service, Homeless People.